

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pembebasan Lahan MRT Fase II Dianggarkan Rp 500 Miliar

Anggaran pengadaan lahan yang disiapkan tahun ini belum terserap.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan *mass rapid transit* (MRT) fase II sebesar Rp 500 miliar. Usul tersebut tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 500 miliar itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan pelbagai infrastruktur MRT fase II, seperti *cooling tower* dan *ventilation tower*. "Itu tidak termasuk (lahan) depo," ujarnya, kemarin. Syafrin memperkirakan, untuk depo MRT fase II, pemerintah DKI memerlukan anggaran sekitar Rp 5 triliun.

Pembangunan MRT fase II dimulai setelah peme-

rintah DKI meresmikan pengoperasian MRT fase I yang membentang dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, hingga Bundaran Hotel Indonesia. Pada akhir Juni lalu, pengerjaan MRT fase II baru tahap penggalian untuk membangun *receiving substation* atau gardu listrik di Monas, Jakarta Pusat.

MRT fase II akan membentang sepanjang 8,3 kilometer dari Bundaran HI hingga Kota, Jakarta Barat. Jalur MRT fase II rencananya dibangun di bawah tanah seluruhnya. Adapun anggaran pembangunannya diperkirakan mencapai Rp 22,5 triliun, yang berasal dari pinjaman lunak dari pemerintah Jepang.

Syafrin menjelaskan anggaran pembebasan lahan MRT fase II sebenarnya sudah dianggarkan tahun ini sebesar Rp 217,6 miliar. Namun anggaran tersebut belum terserap karena PT MRT mengajukan revisi penetapan lokasi untuk

jalur.

Dengan adanya revisi itu, kata Syafrin, pemerintah DKI harus merevisi surat keputusan gubernur. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1728 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota pada 21 November 2018. "Karena ada perubahan lokasi, otomatis SK-nya harus direvisi," katanya.

Syafrin optimistis anggaran untuk pengadaan lahan tahun ini bisa terserap. Sebab, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan telah menerbitkan peta lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan MRT fase II. "Peta sesuai surat dari MRT Jakarta," katanya.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvia Halim, menegaskan perusahaannya telah meng-

identifikasi jalur untuk pembangunan MRT fase II. Lahan yang dibebaskan itu rencananya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti *cooling tower*, *ventilation tower*, dan pintu masuk ke stasiun. Namun Silvia tidak bersedia menjelaskan lokasi lahan yang akan dibebaskan. "Kami masih melakukan FS (*feasibility study*)," tuturnya.

Untuk depo MRT fase II, kata Silvia, paling tidak diperlukan lahan seluas 10 hektare. Depo itu diperkirakan bisa menyimpan 16 rangkaian Ratangga—sebutan kereta MRT. Adapun depo Lebak Bulus sudah tidak bisa menampung tambahan rangkaian Ratangga lagi.

Silvia menjelaskan MRT Jakarta perlu menambah rangkaian kereta karena jalur MRT akan membentang dari Lebak Bulus hingga Kota. "Untuk mempertahankan *headway*, (jarak kedatangan)" ujarnya. ●